



INTISARI

Penulisan tesis berjudul “Konflik Agraria di Register 45 Mesuji Lampung 1967-2012” ditulis dengan menggunakan Metode Sejarah. Penelitian ini hendak mengetahui mengapa konflik agraria di Register 45 Mesuji terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah menggali lebih mendalam tentang sebab-sebab, akibat-akibat dan kondisi yang melestarikan sebuah konflik agraria yang bersifat sistemik. Dimulai dari penetapan kawasan hutan oleh pemerintah, pemberian izin-izin konsesi kepada perusahaan, munculnya konflik dan perlawanan dari masyarakat hingga usaha-usaha penyelesaian konflik. Konflik agraria di Register 45 bermula dari pemberian izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Silva Inhutani Lampung oleh Menteri Kehutanan tahun 1997. Pemberian izin konsesi tersebut terdapat perbedaan luas areal dari izin yang dikeluarkan pemerintah tahun 1991, yang semula 32.600 Ha menjadi 43.100 Ha. Masyarakat Asli Desa Talang Gunung dan Desa Labuhan Batin melakukan protes karena perluasan tersebut mengambil areal wilayah mereka. Krisis ekonomi 1998 memicu masuknya pendatang/okupan ke kawasan Register 45, mereka mendirikan perkampungan dengan nama Moro-moro. Gelombang pendatang/okupan tidak berhenti dan terus merambah kawasan register 45 yang dimotori ormas-ormas dan organisasi adat (Pekat, Tugu Roda dan Megou Pak) dengan berbagai kepentingan. Pemerintah tidak tinggal diam dengan berbagai kebijakan baik persuasif dan represif dilakukan hingga puncak konflik terjadi diakhir tahun 2011 yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan menjadi isu nasional. Pemerintah pusat menurunkan Tim Gabungan Pencari Fakta kasus Mesuji untuk untuk mengungkap fakta dan mencari penyelesaian konflik. Namun konflik semakin meluas dan aktor-aktor yang terlibat semakin banyak.

Kata kunci: konflik, agraria, Register 45, Mesuji

ABSTRACT



The writing of a thesis entitled "Agrarian Conflict in Register 45 Mesuji Lampung 1967-2012" was written using the Historical Method. This study aims to find out why the agrarian conflict in Register 45 Mesuji occurred. The purpose of this research is to dig deeper into the causes, effects and conditions that perpetuate a systemic agrarian conflict. Starting from the determination of forest areas by the government, granting concession permits to companies, the emergence of conflicts and resistance from the community to efforts to resolve conflicts. The agrarian conflict in Register 45 began with the granting of an Industrial Plantation Forest Concession Permit to PT. Silva Inhutani Lampung by the Minister of Forestry in 1997. The concession permit was granted a different area from the permit issued by the government in 1991, which was originally 32,600 Ha to 43,100 Ha. The Indigenous People of Talang Gunung Village and Labuhan Batin Village protested because the expansion took their territory. The 1998 economic crisis triggered the entry of migrants/occupants into the Register 45 area, they established a village called Moro-moro. The wave of migrants/occupants did not stop and continued to penetrate the register 45 area, driven by mass organizations and traditional organizations (Pekat, Tugu Roda and Megou Pak) with various interests. The government did not remain silent with various persuasive and repressive policies carried out until the peak of the conflict occurred at the end of 2011 which resulted in casualties and became a national issue. The central government dispatched a Joint Fact-Finding Team for the Mesuji case to uncover facts and seek conflict resolution. However, the conflict is getting wider and the actors involved are increasing.

Keywords: conflict, agrarian, Register 45, Mesuji